
Strategi Energi Rusia Sebagai Model Dominasi Indonesia di kawasan ASEAN

Rahmat Syahid Suraya

PhD in Political Science and Regional Studies , Ural Federal University, Russia Federation
(Rahmatsuraya11@gmail.com)

Submitted: September 9th 2021; Accepted 27th October 2021

ABSTRACT

Seeing the progress of countries globally cannot be separated from the dominance of developed countries, including Russia, which uses the country's progress by utilizing the energy sector. Indonesia is an abundance country in natural resources and has the opportunity to become a developed country and even become a superpower country in the future. Therefore, a state strategy is needed in developing the Indonesian state in various sectors, including one of the sectors that can be utilized is the renewable energy sector which in a few years will be used with mass produced to replace the fossil energy sector (oil, gas and/or mines). need for the implementation of the strategy presented can be adjusted to the ideals of the Indonesian nation based on the values of Pancasila.

Keywords: Energy, Russia, Strategy, Indonesia. Keywords: Energy, Russia, Strategy, Indonesia

ABSTRAK

Melihat kemajuan negara-negara secara global tidak terlepas dari dominasi negara-negara maju diantaranya yaitu Rusia yang menggunakan kemajuan negara dengan memanfaatkan sektor energi. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki peluang untuk menjadi negara maju bahkan menjadi negara *superpower* di masa depan. Oleh karenanya maka strategi bernegara diperlukan dalam membangun negara Indonesia dalam berbagai sektor termasuk salah satunya sektor yang dapat dimanfaatkan ialah sektor energi terbarukan yang dalam beberapa tahun lagi akan digunakan secara masal menggantikan sektor energi fosil (minyak, gas bumi dan/atau tambang). Perlunya penerapan strategi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Energi, Rusia, Strategi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kebijakan Luar Negeri Dalam Bidang Energi Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di negara-negara Baltik demi melindungi kepentingan geopolitik, menjaga pertahanan nasional untuk menghindari western encirclement dan menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa. Demi

meraih tujuan nasional ini, Rusia menggunakan strategi (atau grand strategy) yang memanfaatkan gas untuk mendatangkan keuntungan finansial untuk meningkatkan kekuatan militer maupun untuk mengendalikan pasar gas dunia termasuk Eropa. Dalam mengelola gasnya, Rusia mengandalkan Gazprom yang merupakan perusahaan gas nasional yang memegang

monopoli 2/3 gas Rusia terutama gas strategis. Gazprom juga memiliki izin resmi untuk memproduksi gas dengan partner asing. Gazprom menjadi leading exporter dalam pasar gas Eropa dan dunia. Gazprom menjalankan bisnisnya dengan mengikuti kebijakan energi dari Kremlin. Gazprom dikembangkan untuk mengatur energi sebagai alat yang tepat untuk kekuatan Rusia dan Gazprom harus menjadi jantung bagi kebijakan luar negeri Rusia saat near abroad Russia menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Kremlin. Gazprom sering disebut sebagai Kementerian Luar Negeri Rusia abad-21 karena peran besarnya dalam hubungan luar negeri Rusia. (Carnelian dkk, 2017:12)

Sebagaimana dengan visi Indonesia emas 2045 dapat diberlakukan mulai dari sekarang, dengan pertimbangan bahwa dunia akan melakukan reset bahwa sumber energi dunia akan beralih dari energi fosil (minyak) menjadi energi terbarukan yang bahan bakunya adalah energi baterai, maka Indonesia dapat berfokus kepada strategi kebijakan mengusai energi baterai yang mampu menjadi alat tawar bahkan alat *deterrence* terhadap negara lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai energi, dan kebijakan seputar energi pada dasarnya merupakan pembahasan yang cukup signifikan frekuensi pembahasannya dalam berbagai forum internasional baik secara akademik maupun secara praktis dalam berbagai kebijakan pada beragam tingkatan mulai dari tingkatan lokal hingga internasional.

Pembahasan energi tidak bisa dipisahkan dari persoalan krisis iklim yang diprediksi para ahli bisa berdampak pada kehidupan manusia di bumi. Dampak yang diprediksi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong bagi aktor-aktor internasional termasuk negara, sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional untuk

mengambil langkah dan berbagai kebijakan menanggapi permasalahan tersebut.

Namun dalam pengambilan kebijakan terkait energi, masing-masing negara memiliki metode dan pendekatan yang berbeda-beda dan unik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perbedaan pendekatan dan metode ini, diantaranya kapasitas dan kapabilitas negara dalam menanggapi persoalan energi. Lebih jauh lagi, kepentingan nasional suatu negara akan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan atau strategi terhadap isu energi ini.

Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan meninjau dua penelitian terdahulu yang memiliki persinggungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Tulisan pertama adalah jurnal tulisan Nugroho, Fei-Lu dan dan Firmansyah (2017) yang berjudul *Developing renewable energy in developing countries: A lesson from Indonesia*. Tulisan pertama yang akan ditinjau ini memiliki kaitan erat dengan gagasan yang penulis kemukakan dalam tulisan ini.

Nugroho dkk (2017) berargumen bahwa dengan perkembangan dunia dalam bingkai teknologi serta ekonomi, maka permintaan akan energi meningkat secara signifikan. Permintaan akan energi ini sayangnya tidak selalu dibarengi dengan ketersediaan bahan bakar sebagai komponen penghasil energi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat maupun untuk industri. Selain keterbatasan dalam tersedianya sumber energi, perbedaan kekuatan ekonomi dan teknologi juga berperan besar dalam mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam pembuatan dan implementasi kebijakan energinya.

Indonesia sebagai negara yang besar secara geografis dan populasi, hingga data tahun 2017 oleh Nugroho dkk masih menunjukkan bahwa energi yang digunakan masih di dominasi oleh energi fosil yang tidak terbarukan. Terdapat beberapa

permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam usaha untuk mengkonversi penggunaan energi tidak terbarukan pada energi terbarukan. Diantaranya adalah biaya yang tinggi serta hambatan teknologi.

Terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, namun perjalanan Indonesia dalam mengkonversi penggunaan energi menjadi energi berkelanjutan cukup menunjukkan hasil yang positif dan menggembirakan. Untuk memantapkan posisi Indonesia dalam kebijakan energi, maka langkah tepat harus diambil Indonesia. Diantara langkah yang perlu diambil oleh Indonesia menurut Nugroho dkk adalah memfokuskan pembangunan energi berkelanjutan pada level desa serta hambatan-hambatan birokratis politis harus diminimalisir. Dengan mengambil dua pendekatan ini, maka langkah Indonesia untuk tampil sebagai negara yang dominan dalam kebijakan energi terbarukan bisa tercapai.

Tulisan kedua yang akan penulis tinjau adalah jurnal ilmiah karya Lee dan Yang (2020) dengan judul *Strategic R&D budget allocation to achieve national energy policy targets: the case of Korea*.

Sebagaimana penelitian yang ditinjau sebelumnya pada tulisan ini, Lee dan Yang berargumen bahwa kemampuan aktor internasional seperti negara dalam menghadapi tantangan energi sangat bergantung pada kondisi domestik negara tersebut. Artinya ketika suatu negara hendak mengambil peran dominan dalam isu energi pada suatu kawasan, maka adalah sebuah keniscayaan jika negara tersebut harus menguatkan kondisi domestiknya terlebih dahulu. Kondisi domestik yang dimaksud disini lebih terfokuskan pada aspek ekonomi domestik suatu negara.

Dalam rangka menguatkan kondisi domestik suatu negara. Pada kasus Korea (Korea Selatan -pen), terdapat tiga ukuran dalam penentuan kebijakan penganggaran dalam kebijakan energi. tiga ukuran tersebut

adalah pertama, performa investasi di masa lalu. Kedua, efek perubahan yang diharapkan di masa depan. Ketiga, resiko investasi tambahan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan, pemerintah Korea Selatan kemudian memberikan fokus penganggaran pada wilayah riset dan pengembangan (R&D) sehingga sumber pengembangan kebijakan energi adalah lingkup domestik Korea Selatan sendiri. Pendekatan yang diambil oleh Korea Selatan ini layak untuk dipertimbangkan oleh Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Indonesia. Pada saat yang sama, cara ini bisa membangkitkan iklim riset energi domestik bagi Indonesia sendiri yang pada akhirnya akan menjadi pondasi bagi posisi dominan yang bisa Indonesia dapatkan di ASEAN dalam bidang energi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang berusaha menggali secara mendalam makna dari data-data yang telah dikumpulkan. Dalam teknik kualitatif ini, penulis menggunakan perspektif Posmodernisme dan Teori Persepsi.

Postmoderenisme merupakan teori sosial yang berakar dari filsafat post-positivisme. Post positivisme secara garis besar merupakan kajian filsafat sosial yang mencoba keluar dari penjara subjektifitas manusia. Meskipun dalam sejarahnya, perkembangan istilah ini pertama kali digunakan untuk menjelaskan gerakangerakan eksperimental di perkembangan seni, sastra, arsitektur, dan budaya barat secara umum. Tetapi sebagai sebuah peranti analisis sosial dan politik, perspektif ini berpendapat bahwa ide pasti tentang kebenaran absolut dan universal harus disingkirkan. Penitik-beratan seharusnya diberikan lebih kepada diskursus, debat, dan demokrasi. (Heywood, 2016:107)

Perspektif ini menolak kepercayaan pengetahuan sosial bahwa ada pengetahuan obyektif atas fenomena sosial. Perspektif ini

muncul akan kritik yang diajukan kepada proyek-proyek Pencerahan dan menolak asumsi-asumsi modernitas seperti Kebebasan, Kemajuan, atau Emansipasi sebagai sebuah kemajuan bagi manusia. Perspektif ini dapat diibaratkan sebagai bunga rampai dari ide-ide pemikir seperti Nietzsche, Heidegger, Derrida, dan Foucault atas berbagai obyek penelitian di bidang sosial pada masanya, sehingga mengategorikan postmodernisme itu sendiri menjadi lebih sulit. Garis pemikiran ini menolak garis pemikiran neorealisme dan neoliberalisme yang mencoba untuk menyederhanakan penjelasan akan dunia yang merupakan kumpulan dari hubungan-hubungan kompleks antar manusia dari setiap zamannya dengan memproduksi teori. (Alfarauqi, 2017:3)

Mengutip Jean Francois Lyotard, postmodernisme adalah sebuah ketidakpercayaan menuju metanaratif/sebuah pengetahuan yang benar secara empiris (Asrudin dkk, 2014:64-65). Sepakat dengan hal tersebut, pemikiran yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan kebenaran empiris dari dunia sosial adalah palsu (Bakri, 2016:53-55). Karena konteks itulah pemikiran ini menerapkan metode dekonstruksi terhadap realitas. Metode dekonstruksi merupakan sebuah upaya yang dilakukan filsuf kenamaan Prancis Derrida. Menurutnya, segala yang muncul dalam proses pengetahuan adalah hasil sudut pandang dari orang yang menafsirkan realitas tersebut. Intinya tidak ada realitas di luar representasi atau seperti yang diucapkan Derrida : *il n'y a pas de hors-texte* (tidak ada satupun yang ada di luar teks). Michael Foucault yang juga merupakan filsuf Prancis menambahkan dimensi moral dalam ajakan Derrida, menurut Foucault, setiap usaha menafsirkan adalah usaha untuk menguasainya. Dalam konteks itulah Foucault menolak asumsi pencerahan akan adanya pemikir yang objektif. Karena pengetahuan tersebut menyatu dengan dunia maka pengetahuan tersebut ikut disertakan dalam perebutan kekuasaan dan pertempuran

yang ada di dunia kita. Kita tidak mungkin memiliki pengetahuan objektif atau kebenaran. (Asrudin dkk, 2014:64)

Menurut Robert Cox dalam sebuah artikel yang berjudul "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory" yang dikutip oleh Umar Suyadi Bakri "theory is always for someone and for some purpose" (Bakri, 2016:53). Ini menegaskan bahwa pengetahuan sosial merefleksikan waktu dan konteks dimana pengetahuan dibuat, dan karena itu pengetahuan serta fakta-fakta yang membentuknya tidak bisa obyektif dan harus mengandung beberapa aspek dari nilai-nilai yang mencetuskannya. Teori juga dianggap sebuah senjata dalam serangkaian peperangan dan pertempuran epistemologis yang berkelanjutan (Edkins dan William, 2013:221). Singkatnya, ada unsur kepentingan (interest), ideologi, dan power dalam teori-teori yang ada. Terbentuknya sebuah teori tidak terlepas dari interest, ideologi dan power, maka ada yang diuntungkan dari teori tersebut Logikanya, jika ada yang diuntungkan, tentu ada yang dirugikan di sana. Misalnya, teori liberal-kapitalis yang melahirkan berbagai institusi internasional. Secara langsung atau tidak langsung teori tersebut didesain untuk menguntungkan negara-negara maju. Sebagai akibatnya, muncul berbagai bentuk relasi kekuasaan, seperti ketidakadilan, kesenjangan, represi, dominasi dan hegemoni. Sementara bentuk yang kedua, semangat emansipasi adalah karakter dari Teori Kritis yang berupaya untuk mendobrak tatanan politik dunia saat ini yang penuh dengan ketimpangan, ketidakadilan, dan ketertindasan (Alfarauqi, 2018:4).

Kerangka analisis di atas kiranya tepat bila digunakan dalam menjelaskan dekonstruksi soft power oleh Rusia. Soft power merupakan konstruksi sebuah teori yang mencoba untuk menjelaskan kejadian di dunia, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari hubungan-hubungan teori ini dengan relasi kuasa yang ada di dunia. Sedangkan

dekonstruksi sendiri merupakan istilah yang masyhur diperkenalkan oleh Derrida, dekonstruksi merupakan sebuah upaya untuk membongkar makna dari teks dan relasi kuasa di dalamnya. Menurut Derrida, bahasa (dan teks) bukanlah sebuah alat komunikasi yang netral, melainkan cair dan ambigu, ini dikarenakan karena melalui Bahasa, ideologi tertentu memprogram kita tanpa kita sadari (Alfarauqi, 2018:4).

Adanya dekonstruksi ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam melihat pengalaman yang ditentukan oleh ideologi yang tidak kita sadari menyatu dalam bahasa. (Haryatmoko, 2016:213) Penulis berpandangan dekonstruksi soft power oleh Rusia adalah merupakan reaksi dari cara pandang Rusia terhadap dunia dan merupakan beberapa Langkah yang diambil guna menciptakan kemajuan suatu negara. Postmodernisme mengajak kita untuk melihat bahwa teori pengetahuan memiliki relasi tentang siapa yang berkuasa (Alfarauqi, 2018:4).

Menurut Ole R Holsti dalam karya Mohtar Mas'ood mendefinisikan bahwa seseorang, kelompok atau negara dalam memandang suatu realitas berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh yang kemudian disesuaikan dengan kepentingan kelompok atau negara tersebut. Tiga komponen yang membentuk persepsi seseorang, kelompok, ataupun negara, yaitu; nilai, keyakinan, dan pengetahuan. (Jones dalam Juliansyah, 2011:8) Contoh demokrasi yang diberlakukan oleh pemerintah memicu timbulnya konflik dan separatisme di dalam negeri. Maka di era pemerintahan Putin berfokus pada usaha untuk mempertahankan Chechnya. Putin yang memiliki latar belakang sebagai anggota KGB (Badan Intelijen Uni Soviet) sejak tahun 1984 sangat mengedepankan nasionalisme. Dalam tugasnya di KGB Putin sempat dipimpin oleh Yuri Andropov. Pimpinan KGB ini kemudian menjadi presiden Uni Soviet, yang selanjutnya digantikan oleh Mikhail

Gorbachev. Ditahun 1997 ia mulai bertugas sebagai Kepala Departemen Kontrol yang begitu berpengaruh dalam pemerintahan Boris Yeltsin, dan kemudian menjadi perdana menteri Rusia ditahun 1999 sekaligus menjadi presiden Rusia menggantikan Boris Yeltsin (Russian Presidential Executive Office, 2018)

Dengan berbekal pengalaman sebagai seorang intelijen KGB, dan tugasnya di Kremlin, maka ia memiliki gaya kepemimpinannya sendiri yang cenderung tegas dalam menghadapi masalah separatisme. Setelah dapat meredam aksi separatisme maka pemerintah memutuskan untuk bergabung dengan OKI. Hal itu dikarenakan Putin memiliki konsep sebagai pemimpin yang berasal dari keluarga yang taat beragama dimana ibunya adalah penganut Ortodoks fanatik maka Putin pernah dibaptis dan rajin mengikuti acara-acara Gereja Ortodoks. Hal ini diperkuat oleh Patriarch Alexius II pimpinan Gereja Ortodoks yang memuji Putin sebagai figur yang baik (Saragih, 2008:110). Sehingga tidak heran ia mempunyai nilai moral yang biasanya selalu bersumber dari nilai-nilai spiritual. (Saputra, 2014:226) Putin juga berinisiatif untuk melindungi dan tidak menganggap agama sebagai musuh dengan modal latar belakang karirnya serta pengetahuannya tentang kondisi domestik dalam membangun Rusia kedepannya. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual. Konsep perubahan persepsi seseorang atau negara mengacu pada pengetahuan yang didapatkan sehingga mengubah keyakinan dan nilai yang selama ini dimilikinya.

Tahap pertama dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri adalah timbulnya suatu situasi atau masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi. Pertama, terdapat stimulus atau rangsangan dari lingkungan, yang disebut "trigger event". Kedua, adanya upaya mempersepsi stimulus itu, ini adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata, dan menilai informasi

yang masuk tentang dunia sekitarnya. Ketiga, adanya upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan (Mas'ood, 1989:19-22). Persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Jadi, orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "ketahui". Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang "kenyataan" (Mas'ood, 1989:19-22). Penulis mencoba menyederhanakan hubungan antara persepsi dengan pembuatan keputusan dalam sebuah bagan.

Tabel 1



HASIL DAN ANALISIS

KONSTRUKSI RUSIA DAN SPHERES OF INFLUENCE

Dalam konteks kebijakan luar negeri, menurut Rusia, perlu adanya satu atau dua kekuatan yang dapat melawan hegemoni AS di dunia semata untuk memberikan fungsi kontrol juga sebuah pesaing sebagai bentuk balance of power agar dunia dapat terlepas dari cengkraman hegemonik AS dan Barat.

Tugas tersebut berada di pundak Rusia, ini tercermin dari berbagai kebijakan luar negeri Rusia yang dilakukan pasca runtuhnya Uni Soviet. Rusia merasa perlu memainkan peran sentral untuk maju menjadi lawan sepadan untuk AS. Motivasi inilah yang menjelaskan betapa Rusia sangat teguh untuk membela beberapa negara yang menjadi ancaman AS, seperti contohnya: di Suriah, ketika AS ingin ikut campur dengan masuk ke dalam persoalan dalam negeri negara tersebut dengan berbagai motif dan alasan.

Selain itu Rusia juga membangun kerja sama intensif dengan China yang dianggap banyak ahli sebagai sebuah negara yang akan berkembang menjadi sebuah negara besar yang dapat melampaui dominasi AS di dunia. Rusia menganggap peta persaingan kuasa (Struggle of Power) yang dilakukan negara-negara adi kuasa di dunia merupakan sebuah hal yang kondusif untuk menjaga perdamaian dunia secara lebih luas. Karena inilah Rusia merasa perlu memiliki soft power khusus untuk memenangkan dominasi AS terhadap dunia melalui pembentukan opini alternatif atas dunia.

Dalam melihat negara-negara eks-Uni Soviet, Putin berpandangan bahwa masih sangat banyak masyarakat Rusia (merujuk pada ras Rusia) yang masih berada di luar teritori Rusia dan tersebar di negara-negara di sekitar Rusia. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi Putin terkait Rusia baru adalah sebuah negara yang terdiri dari seluruh penduduk di wilayah Rusia ditambah etnis Rusia yang tersebar luas di luar teritori wilayah Rusia seperti etnis Rusia yang berada di wilayah Crimea, Ukraina, Turkmenistan, Khazakstan, Belarus, Tajikistan dan negara sekitar Rusia lainnya. Ia berusaha mengonstruksi kesamaan sejarah, kultur, budaya dan identitas yang dimiliki Rusia dan negara-negara eks-Uni Soviet, negara-negara ini sering disebut para ahli sebagai the near abroad. Istilah ini yang mengacu wilayah-wilayah yang ingin dikontrol dan dikuasai oleh Rusia atau dalam konteks geopolitik Rusia sebagai spheres of Influence yang merupakan negara-negara terdekat dari Rusia dan merupakan negara-

negara eks-Uni Soviet dan ekskomunisme (Radin dan Reach, 2017:10-12).

STRATEGI MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA NEGARA LAIN

Media sebagai aktor produksi soft power juga dibantu dengan kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pemerintah seperti pembentukan badan soft power nasional *Rossotrudnichestvo* yang bekerja untuk memberikan bantuan finansial kepada negara tetangga (sedikit banyak badan ini memiliki fungsi yang sama seperti USAID di AS) dan juga penguatan nilai-nilai kebudayaan seperti penguatan bahasa Rusia dan pemberian scholarship ke negara-negara berkembang. Jadi sama seperti model soft power AS, model Rusia tidak serta merta memberikan seluruh fungsi produksi soft power kepada media meskipun media merupakan aktor yang paling dominan (Alfarauqi, 2018:9). Dengan melihat angka populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta, dan Sebagian besarnya populasi milenial maka peluang Indonesia terbuka lebar untuk mengirimkan putra-putri bangsa bersekolah ke luar negeri dan melakukan integrasi social serta pengetahuan dengan subsidi dan jaminan kerja sesuai standar luar negeri. Hal yang sama dapat diberlakukan oleh pemerintah dalam membuka program beasiswa dan subsidi belajar gratis ke Indonesia terutama program budaya dan program belajar pengolahan sumber daya alam nikel sebagai misi Indonesia menjadi raja baterai dunia.

STRATEGI RUSIA DALAM BIDANG ENERGI

Alexey Miller CEO Gazprom menyatakan bahwa Putin ingin menjadikan Gazprom sebagai meknisme besar untuk peningkatan kebijakan luar negeri Rusia ke Asia, Eropa dan dunia. Gazprom bekerjasama dengan perusahaan asing seperti Shell untuk dapat mengirim gas hingga ke berbagai tempat yang jauh. Gazprom mengambil gas untuk ekspor dari sumber melimpah di Asia Tengah dan memanfaatkan Laut Kaspian sebagai jalur dagangnya. Putin berhasil

meningkatkan ekonomi Rusia dengan perdagangan energi ke UE. Kini Putin berusaha merambah tempat yang semakin jauh dan memproduksi lebih banyak gas. Gas Rusia yang semakin melimpah dengan infrastruktur yang maju dan berkases langsung ke UE akan meningkatkan ketergantungan UE. Hal tersebut dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di Eropa dan menyatukan near abroad dalam kekuatan Rusia untuk keamanan nasional Rusia (Alfarauqi, 2018:13).

Dengan mengembangkan sektor energinya, Rusia membuat kebijakan untuk mengundang FDI dan membeli lahan-lahan energi di near abroad sebagai tambahan penyimpanan gas. Dengan meningkatkan produksi gas, Rusia berekspektasi untuk mendiversifikasikan konsumernya di luar Eropa. Rusia berharap dengan rencana akan dibukanya pasar gas Internasional sesudah tahun 2020, Rusia dapat memimpin pasar tersebut dengan statusnya sebagai negara yang memiliki simpanan gas terbanyak. Rusia juga mengembangkan inovasi-inovasi dari penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengembangkan energi alternatif untuk mengurangi dependensi terhadap energi karbon. Rusia juga melimitasi politisasi dengan memotong jalur negara transit pro-Barat. Gazprom sebagai perusahaan energi nasional terutama gas terbesar di Rusia kini menjadi perpanjangan tangan Kremlin dalam kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi politik negara konsumen terutama UE dan near abroad, dengan memanfaatkan ketergantungan mereka demi tujuan nasional Rusia. Rusia memiliki berbagai hubungan kebijakan dengan UE (Alfarauqi, 2018:13).

KEBIJAKAN RUSIA UNTUK MEMPERTAHANKAN DOMINASI DI KAWASAN BALTIK

Putin sangat berfokus pada energi dan keamanan karena pendidikan dan profesinya. Dia bersekolah di St.Petersburg University dan mengambil Sekolah Hukum untuk

Sarjana dan Hukum Ekonomi untuk Magister. Untuk S3 dia menulis disertasi mengenai Ekonomi Pertambangan di Sekolah Pertambangan Universitas St.Petersberg yang diampu oleh Aleksander Litivenko yang berprinsip bahwa cara untuk menguasai negara-negara post-Soviet adalah dengan membuat mereka bergantung pada energi Rusia dan mempengaruhi mereka dengan keadaan itu untuk bersekutu dengan Rusia. Dengan doktrin pembelajaran seperti itu, Putin menjadi memiliki pemikiran bahwa ekonomi berbasis energi merupakan cara tepat bagi Rusia untuk menguasai near abroad (Alfarauqi, 2018:21).

Maka dari itu kebijakan energi Rusia dimanfaatkan untuk menguasai near abroad sesuai di dalam grand strategy Rusia kepada negara Baltik.Rusia yang sangat mementingkan geopolitik dan keamanan wilayah karena latar belakangnya sebagai KGB Soviet yang berpendapat bahwa pertahanan negara yang dapat membuat sebuah negara besar. Maka dari itu di awal pemerintahannya, Putin melakukan operasi militer ke Kaukasus Utara demi mempertahankan wilayah itu dari pemberontak dan melakukan operasi di Krimea yang merupakan basis dari Angkatan Laut Laut Hitam Rusia untuk mempertahankannya tidak jatuh ke pemerintahan pro-UE. Putin berusaha menjaga wilayahnya, mengembalikan atau menanam kekuasaan Rusia di tempat lain termasuk Baltik dan Ukraina yang di bawah NATO dan UE(Alfarauqi, 2018:21).

Motivasi Putin cenderung menjadi ingroup bias yaitu memandang kelompok mana yang menjadi pusat dunia.Menurut Putin dan birokrasinya Rusia adalah pusat dari dunia terutama dari pasar gas. Putin merasa bahwa kelompok pertahanan adalah pusat dari kejayaan suatu negara, layaknya KGB dalam Soviet. Putin juga berharap dengan kekuatan pertahanan dan energi Rusia, dapat melawan dominasi transatlantik demi menjaga keseimbangan kekuatan di dunia. Latar belakang kebijakan Putin selalu

didasari dengan persepsi untuk mengembalikan kekuatan besar Rusia yang hilang agar Rusia menjadi aktor besar di dunia lagi dan dicapai dengan menguasai near abroad dalam pengaruhnya (Alfarauqi, 2018:22).

Selain itu Rusia harus mampu menjaga keseimbangan di Eropa dari dominasi NATO dan UE yang terus membesar dengan Enlargment. Maka dari itu, semua kebijakannya mengarah ke dalam bidang energi dan selalu meningkatkan infrastruktur energi mereka seperti gas untuk menyokong perekonomian ketika anjloknya harga minyak. Ditahun tahun yang akan datang bahan energi bersumber dari baterai mendominasi dunia, strategi tersebut dapat digunakan Indonesia dalam menekan dan melakukan diplomasi dengan negara lain demi terwujudnya kepentingan nasional (Alfarauqi, 2018:22).

Dikarenakan energi merupakan fokus dari pemerintahan Putin, maka Gazprom menjadi sosok penting dalam pemerintahan Rusia. Birokrasi penasihat tetap menjadi penting bagi pemerintahan individual untuk menetralkan emosi dari pemimpin dan membantu pemimpin membuat kebijakan yang tidak merugikan. Di masa Putin lingkaran itu dinamakan Siloviki yang berarti men of security. Putin juga menaruh beberapa Siloviki di Gazprom untuk memastikan Gazprom menerapkan kebijakan sesuai dengan kemauan Kremlin. Siloviki disebut Barat sebagai militer dalam politik yang menyebabkan Rusia menjadi negara non demokratik. Silivoki menurut Kevin Rosner umumnya berbentuk security service, secret service dan militer yang bekerja dalam lingkaran terdekat Putin untuk mempertahankan negara (Alfarauqi, 2018:24).

Seluruh Siloviki memiliki pemikiran dan tujuan yang sama mengenai Rusia, sehingga mudah bagi mereka untuk membuat kebijakan sesuai dengan prinsip kepentingan Rusia yang sudah tersusun terlebih dahulu yaitu antara lain: pemerintahan sentralisasi,

pengembangan keamanan dan ketahanan negara yang didukung oleh ekonomi yang melimpah, pengembangan sektor energi untuk ekonomi nasional, menyeimbangkan diri dengan NATO dan AS, serta mengembalikan pengaruh Rusia di negara post-Soviet untuk mengembalikan kekuasaan wilayah Timur (Alfarauqi, 2018:29). Hal tersebut juga dapat ditiru oleh pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan perusahaan BUMN agar dapat menjadi instrument negara di negara lain termasuk ASEAN sebagai negara Kawasan terdekat dengan Indonesia mengingat potensi Indonesia yang sangat besar dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat lebih memajukan Indonesia dalam sektor bisnis dan hal lainnya.

Kebijakan energi luar negeri Rusia sudah sejalan dengan tujuan nasionalnya. Putin membuat kebijakan energi yang membatasi keterlibatan UE dalam investasi dalam negrinya kecuali bagi perusahaan negara klien yang bersedia investasi bagi infrastruktur gas. Rusia di bawah Putin memang memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi menggunakan energi dengan cara pengembangan produksi, distribusi dan infrastruktur untuk dapat tetap membuat gas Rusia menjadi gas terdepan dunia. Putin dan birokrasi terdekatnya (siloviki) menjadikan Gazprom sebagai perpanjangan tangan dari kementerian LN untuk dapat mengontrol negara-negara sekitarnya terutama near abroad. Mereka menganggap near abroad harus dapat dikuasai melalui kerjasama energi, demi mengembalikan kekuatan besar Rusia seperti ketika Soviet mampu menguasai dunia. Dengan Rusia mampu menguasai seluruh near abroad di sekelilingnya, maka Rusia akan menghindari western encirclement sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengembalikan keseimbangan kekuasaan di Eropa yang selalu memiliki dua kutub, Barat dan Timur dengan penguasanya masing-masing bukan digabungkan seperti rencana UE (Alfarauqi, 2018:30).

Hal ini sesuai dengan teori FPA (Foreign Policy Analysis) yang menggambarkan latar belakang kebijakan dibentuk bukan hasilnya. Apabila hal tersebut juga dapat diterapkan di Indonesia sebagai contohnya perusahaan-perusahaan milik pemerintah Indonesia menguasai pasar luar negeri termasuk ASEAN maka hal tersebut dapat mengembalikan kekuatan Indonesia sebagai macan Asia, bahkan yang lebih hebat lagi sebagaimana strategi menguasai pasar luar negeri tersebut diterapkan di negara Timor Leste yang sempat menjadi bagian Indonesia, akan sangat memungkinkan bahwa negara Timor Leste dapat menjadi bagian Indonesia dikarenakan pasar negara tersebut sudah dikuasai dan didominasi. Kebijakan merupakan cerminan sifat, perspektif dan tujuan dari pemimpin serta birokratnya (Alfarauqi, 2018:30).

Putin dan Silovikinya memiliki latar belakang pertahanan melalui KGB sehingga kebijakan mereka bertujuan akhir keamanan wilayah dengan tindak apapun. Selain itu mereka semua berpendapat sesuai dengan doktrin KGB bahwa Rusia akan selalu kuat bila mampu mempertahankan near abroad untuk melawan Barat. Selain KGB, Siloviki juga berasal dari Fakultas Hukum, Energi dan Ekonomi di St.Petersburg, sehingga kebijakan mereka didasarkan oleh kebijakan energi, terutama rektor panutan Putin merasa bahwa untuk menguasai near abroad maka Rusia harus mampu mengendalikan mereka lewat ketergantungan energi. Prinsip pemerintahan Putin sudah sejalan dengan Grand Strategy sehingga hasil semestinya dapat dicapai hanya semua juga bergantung pada respon pemerintahan asing yang tidak terlacak (Alfarauqi, 2018:31).

Respon UE terhadap kebijakan Rusia akan tetap abu-abu selama UE tidak pernah memiliki suara bulat untuk melawan Rusia, sehingga potensi Rusia untuk dapat mempertahankan wilayah Timur akan semakin kuat. Masalah apakah kelak akan berhasil dan membawa hasil yang baik bagi sistem Internasional, hal itu tergantung dari

seluruh pihak NATO-UE-Baltik Rusia dan sistem dunia. Selama masing-masing dapat menghormati batas wilayah seperti sekarang konflik keamanan bisa dihindari dan konflik pengaruh melalui energi tetap berjalan (Alfarauqi, 2018:31).

MENGHADAPI KRISIS LEGITIMASI KEKUASAAN

Kebijakan Putin didukung oleh lingkaran terdekatnya yang juga adalah penasehat dan birokrasi di pemerintahan maupun Gazprom. Karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka yang sama dengan Putin, maka perspektif mereka mengenai Rusia sama terutama mengenai kebutuhan untuk didukung dengan kebijakan-kebijakan energi dan pertahanan yang sesuai bagi domestik maupun luar negeri. Kebijakan-kebijakan Putin terhadap Baltik maupun Uni Eropa bisa dikatakan anti demokrasi dapat membangun negaranya yang hancur pada tahun 1991 dan mengembalikan kejayaannya demi kualitas hidup warga Rusia yang lebih baik (Alfarauqi, 2018:29).

Dalam konteks dalam negeri, Putin melihat Rusia baru adalah kelanjutan dari kedigdayaan Uni Soviet. Menurutnya, kehancuran Uni Soviet adalah sebuah bencana geopolitik yang terbesar di abad ini dan bagi Rusia itu adalah sebuah drama. Putin menganggap bahwa Rusia seharusnya menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar dari teritorinya yang sekarang, ini merujuk pada negara-negara eks Soviet yang telah runtuh menjadi sebuah negara-negara baru di Eropa Timur (Alfarauqi, 2018:6).

Berkaca dari Rusia yang sebelumnya menghadapi krisis legitimasi kekuasaan di era Soviet sehingga terpecah menjadi negara baru maka pentingnya berkaca dari kegagalan dimasa lampau sebagai kondisi dan situasi yang perlu dibenahi oleh bangsa Indonesia agar tidak mengalami kegagalan serupa dengan menyatukan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi cita-cita itu tak akan terwujud jika kondisi penghayatan Pancasila terus-terusan semakin mengalami kemerosotan, seperti

sekarang ini. Saat ini, peradaban dan semangat zaman telah dibangun berdasarkan kebudayaan global yang miskin akan identitas dan kearifan. Nilai-nilai luhur Pancasila sama sekali tidak menjadi spirit dalam membangun peradaban bangsa. Maka dari itu, isu ini dapat dianggap bertindak sebagai peringatan bagi bangsa untuk memulai introspeksi (Febriana, 2018:7).

Beralih dari fokus dunia materi, kembali memandang kedalaman jiwanya yang immateri, karena penghayatan suatu nilai tidak lahir dari pengalaman dan pengamalan secara lahiriah saja, namun nilai tersebut harus meresap, untuk kemudian secara perlahan tumbuh melalui perjalanan batin. Sebagai peringatan, isu tersebut seolah mewanti-wanti setiap warga negara untuk lebih menghayati Pancasila sebagai pondasi bernegara dalam rangka mewujudkan konsistensi dalam menjaga ketunggalan negara ini. Ketunggalan tersebut termanifestasi dalam suatu konsep otentik asli negeri ini yaitu, "gotong royong".

Soekarno merangkum Pancasila dalam satu kata: "gotong royong" (Dewantara, 2017:70). Penghayatan terhadap Pancasila yang kurang secara otomatis membuat semangat "gotong royong" di jiwa warga negara juga akan ikut berkurang, kemudian muncullah "krisis gotong royong" (Dewantara, 2017:16). Bukan tidak mungkin, apabila degradasi penghayatan Pancasila ini terus berlanjut dari generasi ke generasi secara otomatis ketunggalan bangsa juga akan ikut tergerus, maka isu 2030 Indonesia bubar tidak lagi sebuah "isu" tetapi berubah menjadi "fakta". Tidak usah menunggu tahun 2030, apabila Pancasila tidak lagi menjadi pondasi peradaban negara maka integrasi ketunggalan bangsa negara ini bisa runtuh sewaktu waktu. (Rahman, 2021) Oleh karena itu, isu ini mari dijadikan "peringatan" bagi bangsa Indonesia ini, apabila ingin negara Indonesia masih tetap eksis untuk selamanya, apabila ingin menggapai cita-cita bangsa, apabila ingin Indonesia menjadi mercusuar dunia, maka Pancasila harus dijadikan fundamen dalam aspek kehidupan apapun. Entah itu menjadi

dasar berfikir, bertata laku, hidup bermasyarakat, hingga bernegara, semuanya harus berfondasikan Pancasila (Febriana, 2018:8)

DAFTAR PUSTAKA

Asrudin et. al. (2014). Metodologi Ilmu Hubungan Internasional perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif. Malang: Intrans hal. 64-65.

Bakri, U.S. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal. 53-55.

Chikitta Carnelian, Daru Purnomo, Adrianus Bintang HN. (2017). Strategi Energi Vladimir Putin Dalam Mempertahankan Dominasi Rusia Di Negara-Negara Baltik. Jurnal Cakrawala ISSN 1693 6248, UKSW. Salatiga

Dewantara, A. (2017). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno). Yogyakarta: PT Kanisius

Dylan Aprialdo Rahman. (2018). Kompas. Prabowo Ungkap Pidatonya Soal Indonesia Bubar Tahun 2030 Atas Kajian Ahli Intelijen. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/13062071/prabowo-ungkap-pidatonya-soal-indonesia-bubar-tahun-2030-atas-kajian-ahli?ungkap-pidatonya-soal-indonesia-bubar-tahun-2030-atas-kajian-ahli,%20diakses%2027%20November%202018>. diakses pada 20 Oktober 2021

Edkins, J. & Williams, N.V. (2013). Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal. 221.

Hartanto. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual,

dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Indonesian Perspective, 1(2). Hal. 31-47.

Haryatmoko, Critical Discourse Analysis (analisis Wacana Kritis, Landasan Teori Metodologi dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hal. 213

Heywood, A. (2016). Ideologi Politik Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.107.

Mas'oed, Mohtar. 1989. Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisasi. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas - Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Mita Febriana. (2018). Isu 2030 Indonesia Bubar Sebagai Peringatan Bagi Ketunggalan Bangsa Dan Penghayatan Pancasila Di Era Sekarang. Jurnal Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala. Madiun.

Mohamad Dziqie Aulia Alfarauqi. (2018). Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 2, Oktober 2017-Maret 2018, <https://doi.org/10.18196/hi.62111>, Samarinda.

Office, Russian Presidential Executive. 2018 Biography. Vladimir Putin Personal Website. <http://eng.putin.kremlin.ru/bio>.

Rachman, Aprialdo (2018), Prabowo Ungkap Pidatonya soal Indonesia Bubar Tahun 2030 atas Kajian Ahli Intelijen <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/13062071/prabowoungkap-pidatonya-soal-indonesia-bubar-tahun-2030-atas-kajian-ahli>, diakses 20 Oktober 2021

INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES

Volume 2 Normor 1 Tahun 2021

- Radin, A. & Reach, C. (2017). Russian view of International Order. Rand Corporation: Santa Monica. Hal 10-12
- Saragih, Simon. 2008. Bangkitnya Rusia Peran Putin dan Eks KGB. Jakarta: Kompas.
- Saputra, Andi Rafael. 2014. Dari Uni Soviet Hingga Rusia. Yogyakarta: Palapa